

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Polisi, Kepolisian dan Fungsi Kepolisian

##### 1. Pengertian Polisi dan Kepolisian

Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani “*Politeia*” yang berarti pemerintah negara kota. Menurut Van Vollenhoven dalam bukunya “*Politie Overzee*” istilah “*Politie*” didefinisikan, meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.<sup>1</sup>

Di dalam *Black's Law Dictionary* arti kepolisian disini ditekankan pada tugas-tugas yang harus dijalankan sebagai bagian dari pemerintahan, yakni memelihara keamanan, ketertiban, ketentraman masyarakat, mencegah dan menindak pelaku kejahatan. Sesuai dengan Kamus Umum Bahasa Indonesia, bahwa polisi diartikan sebagai badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang dsb.) dan anggota dari badan pemerintah tersebut diatas (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dsb.)

Menurut pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Polri, kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga polisi sesuai dengan pengaturan perundang-undangan.

##### 2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian sebagai fungsi pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang dimaksud sebagai titik tolak pemikiran adanya konsep dasar legitimasi untuk melakukan tindak pemerintahan khususnya bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi:

- a. Fungsi Preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
- b. Fungsi represif sebagai fungsi penegakan hukum.

---

<sup>1</sup> Sadjijono,., “*Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good governance*”, (Surabaya: Laksbang Mediatama, 2008) Hlm 49-50

Di dalam penyelenggaraan dua fungsi diatas melekat kewajiban untuk melakukan upaya meredakan ketegangan, menyatupadukan bangsa dan upaya mengembangkan penyesuaian, karena itu menurut **Ateng safrudin** yang ditulis ulang dibuku Dr. Sadjjino, S.H., M.Hum. dengan judul buku “*Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*”, makin luas *system social*, makin rumit pula suatu fungsi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam mission jabatan.

Tugas dan wewenang kepolisian sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 mempunyai tugas pokok yang meliputi, pemeliharaan kemanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas tugas kepolisian dimaksud secara umum diatur dalam pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, sedangkan untuk wewenang secara umum diatur dalam pasal 15. Kewenangan secara khusus dalam menyelenggarakan tugas bidang proses pidana selain diatur dalam pasal 16, juga di atur dalam pasal 7 ayat (1) undang-undang no 8 tahun 1981 tentang KUHAP.<sup>2</sup>

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Ibid. Hlm 62

<sup>3</sup> Dellyana,Shant., “*Konsep Penegakan Hukum*”, (Yogyakarta: Liberty 1988), Hlm 32

<sup>4</sup> Ibid., Hlm 33

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Penegakan Hukum dibedakan Menjadi dua, yaitu :<sup>5</sup>

a. Dari Subyeknya :

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan *normative* atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

b. Dari Obyeknya, yaitu dari segi hukumnya :

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:<sup>6</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana *substantif* (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

---

<sup>5</sup> Ibid., Hlm 34

<sup>6</sup> Ibid., Hlm 39

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan sebagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan.

## **2. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah :<sup>7</sup>

### **a. Faktor Hukum**

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara *normative*.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

### **b. Faktor Penegakan Hukum**

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto., “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, (Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada 2004) Hlm 42

c. Faktor Sarana

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tentang Tindak Pidana

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>8</sup> Dari berbagai literature dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *Strafbaarfeit* dalam Bahasa Belanda, di terjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam

---

<sup>8</sup> Kartonegoro, "Diklat Kuliah Hukum Pidana", (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa), Hlm 62

Bahasa Indonesia oleh sarjana-sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delic* dan perbuatan pidana. Sementara ada beberapa istilah yang digunakan dalam undang-undang antara lain :<sup>9</sup>

Peristiwa pidana, istilah ini antara lain digunakan dalam undang-undang dasar sementara tahun 1950 khususnya dalam pasal 14.

- a. Perbuatan pidana, istilah ini digunakan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1951 tentang tindakan sementara untuk menyelenggarakan kesatuan susunan, kekuasaan dan acara pengadilan-pengadilan sipil.
- b. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan dalam undang-undang Darurat Nomo 2 tahun 1951 tentang Perbuhan *Ordonantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen*.
- c. Hal yang diancam dengan hukum, Istilah ini digunakan dalam Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Penyelesaian Perselesaian Perburuhan.
- d. Tindak Pidana, istilah ini digunakan dalam berbagai undang-undang, antara lain :
  - i. Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum.
  - ii. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi.
  - iii. Penetapan Presiden Nomor 4 tahun 1964 tentang Kewajiban Kerja Bakti Dalam Rangka Per masyarakatan bagi Terpidana karena melakukan tindak pidana yang merupakan kejahatan.

Adapun para ahli hukum yang termasuk dalam kelompok monistis antara lain :

- a. J.E. Jonkers. Merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*Wederrechtelijke*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. (Lamintang, 1997:135).
- b. Simons. Merumuskan *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang dengan sengaja tidak dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (Lamintang. 1997:127).

---

<sup>9</sup> Tongat, “*Dasar-dasar Hukum Pidana Indoneisa Dalam Perspektif Pembahuruan*”, (Malang: Umm Press, 2010), hlm 91-92

Dari beberapa rumusan kelompok monitis tersebut terlihat bahwa *strafbaar feit* atau tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari orangnya. Sedangkan, para ahli hukum dari kelompok dualistis memberikan pendapat sebagai berikut :

- a. Pompe. Menyatakan bahwa *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindakan yang menurut rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum (Lamintang, 1997: 174).
- b. Vos. Merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi, 2002: 16).
- c. R. Tresna. Memberikan definisi bahwa peristiwa pidana itu adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Adami Chazawi, 2002, 27)

Menurut **Teguh Prasetyo** “Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana.” Pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang dilarang oleh hukum) dan perbuatan pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>10</sup>

Berdasarkan kutipan-kutipan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tindak pidana adalah perbuatan pidana melakukan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang diatur oleh hukum dan diancam pidana apabila melanggar. Dengan demikian, tindak pidana haruslah ada perbuatan yang melanggar aturan hukum yang ada.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pornografi**

### **1. Pengertian Pornografi**

Menurut *Black's Law Dictionary* yang di tulis ulang dalam buku Adami Chazawi yang berjudul “Tindak Pidana Pornografi”, “istilah pornografi berasal dari dua suku kata *Pornos* dan *Grafi* dalam Bahasa latin. *Pornos* artinya suatu perbuatan asusila atau tidak senonoh atau cabul. Adapun *grafi* adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda, misalnya patung serta alat untuk mencegah dan menngugurkan kehamilan”.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana Edisi Revisi*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011) hlm 4

<sup>11</sup> Adami Chazawi, “*Tindak Pidana Pornografi*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Hlm 8

Menurut *Muntaqo* dan *Burhan Bungin* Pornografi di media massa terbagi dalam beberapa bentuk :<sup>12</sup>

- a. *Pornografi*, gambar-gambar porno yang dapat diperoleh dalam bentuk foto dan gambar video.
- b. *Pornoteks*, adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, testimonial atau pengalaman pribadi secara detail atau vulgar, sehingga pembaca merasa ia menyaksikan sendiri, mengalami atau melakukan sendiri peristiwa hubungan-hubungan seks itu.
- c. *Pornosuara*, suara atau tuturan dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung, bahkan secara halus atau vulgar tentang objek seksual atau aktivitas seksual.
- d. *Pornoaksi*, adalah suatu penggambaran, aksi Gerakan, lenggokan liukan tubuh yang tidak disengaja ataupun sengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual.

Pengertian Pornografi sendiri menurut undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 1 “pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”.

Sedangkan menurut undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pada pasal 27 ayat (1) tidak menyebutkan apa itu pornografi akan tetapi pada pasal 27 ayat (1) menegaskan “hal-hal yang melanggar kesusilaan”.

Ada keterkaitan antara penjelasan pornografi pada pasal 1 undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan pasal 27 ayat (1) undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dalam poin “**melanggar kesusilaan**”.

---

<sup>12</sup> Prof. Rusli Muhammad., “*Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*”, (Yogyakarta: UII Press, 2019) Hlm 76-77



Berdasarkan kutipan diatas penulis dapat menjelaskan bahwa pengertian pornografi menurut undang-undang No 44 tahun 2008 tentang pornografi lebih luas dari sudut etimologi dan juga lebih luas dari pada pasal 27 ayat (1) undang-undang RI No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dan juga KUHP, yang mana pasal 27 ayat (1) hanya menyebutkan tentang “melanggar kesusilaan” namun menurut Adami Chazawi didalam bukunya yang berjudul **Tindak Pidana Pornografi** dihalaman 7 menyebutkan “Tindak Pidana Pornografi merupakan bagian dari Tindak pidana Kesusilaan”, dan juga didalam penejelasan pornografi di undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, juga ada menyebutkan “melanggar norma kesusilaan” dari penjelasan ini penulis bisa menyimpulkan bahwa pengertian pornografi menurut undang undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dan pasal 27 ayat (1) undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik saling berkaitan satu sama lain.

## **2. Pengerian *CyberPorn***

Belum ada definisi khusus yang disepakati para ahli tentang *Cyber* pornografi atau pornografi di internet dari beberapa literatur buku maupun intertenet pengertian dari *cyber* pornografi hanya berkisar dari penerjemahan kata tersebut dan pengertian dari *cybercrime* dan pornografi itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *cyber* pornografi atau pornografi di internet dapat di artikan sebagai penyebarluasan muatan atau materi pornografi dalam dunia maya melalui tekhnologi informasi berupa internet.

## **3. Aturan Hukum Pornorafi di Indonesia**

### **a. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Tindak pidana pornografi dimuat dalam pasal 29 s/d pasal 38 undang-undang pornografi. Apabila dilihat dari sudut perbuatan yang dilarang, terdapat 33 tindakan pidana pornografi, dimual dalam 10 pasal, pasal tersebut adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

- i. Tindak pidana pornografi memproduksi, membuat dan lainnya pornografi (Pasal 20 jo. Pasal 4 ayat (1)). Dalam tindak pidana ini terdapat 12 bentuk perbuatan yang dilarang terhadap objek pornografi.
- ii. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2)).
- iii. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh produk pornografi (Pasal 31 jo. Pasal 5)

---

<sup>13</sup> Adami Chazawi, Op.Cit., Hlm 118

- iv. Tindak pidana memperdengarkan, mempertontonkan, dan lainnya produk membuat, dan lainnya pornografi (Pasal 32 jo. Pasal 6) ada 6 perbuatan yang dilarang oleh Pasal 32 jo. Pasal 6.
- v. Tindak pidana mendanai atau memfasilitasi perbuatan memproduksi, membuat, dan lainnya pornografi (Pasal 33 jo. Pasal 7).
- vi. Tindak pidana sengaja menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 34 jo. Pasal 8).
- vii. Tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi (Pasal 35 jo. Pasal 9).
- viii. Tindak pidana mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum (Pasal 36 jo. Pasal 10)
- ix. Tindak pidana melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek dalam tindak pidana pornografi (Pasal 37 jo. Pasal 11)
- x. Tindak pidana mengajak, membujuk, dan lainnya anak dalam menggunakan produk atau jasa pornografi (pasal 38 jo. Pasal 12). Dalam tindak pidana ini terdapat 7 perbuatan yang dilarang.

b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Didalam undang-undang Informasi dan Transaksi elektronik tidak disebutkan secara tegas apa itu tindak pidana pornografi, namun undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengklasifikasikan perbuatan yang dilarang di jelaskan dalam pasal 27 hingga pasal 37.<sup>14</sup> Khususnya untuk pornografi di atur didalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Kemudian Pasal 45 undang-undang informasi dan transaksi elektronik menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Maskun., Op.Cit., Hlm 33

<sup>15</sup> L. Heru Sujamawardi, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Dialogia Iuridica*. Volume 4 Nomor 2, April 2018, Hlm 87

c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam KUHP, namun tetap memberlakukan juga KUHP sekedar diberi syarat “sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang nomo 44 tahun 2008 tentang pornografi”. Macam-macam tindak pidana pornografi dalam KUHP adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

- i. Tindak pidana pornografi sengaja dan culpa (Pasal 282).
- ii. Tindak pidana pornografi pada orang belum dewasa (Pasal 283).
- iii. Tindak pidana pornografi dalam menjalankan pencarian dengan pengulangan (Pasal 283 bis).
- iv. Pelanggaran menyanyikan lagu dan berpidato yang isinya melanggar kesuslilaan (pasal 532)
- v. Pelanggaran pornografi pada remaja (Pasal 533).
- vi. Pelanggaran pornografi mempertunjukan sarana untuk mencegah kehamilan (Pasal 534)
- vii. Pelanggaran pornografi menunjukan sarana untuk menggugurkan kandungan (Pasal 535)

**E. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial**

**1. Pengertian Media Sosial**

Media Sosial didefinisikan sebagai sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia. Andreas Kaplan mendefinisikan media sosial sebagai sebuah kelompok berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated conten*.<sup>17</sup>

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial, sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang antara lain : Blog,

<sup>16</sup> Adami Chazawi, Op.Cit., Hlm 68-69

<sup>17</sup> Michael Haenlein, “*User of the world unite! The challenge and opportunities of Social Media*”. (Business Horizons, 2010) Hal. 59-68

Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp dan Wikipedia. Menurut Van Dijk definisi media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.<sup>18</sup>

Pengertian Media Sosial Menurut Parah Ahli :

- a. M.L Kent, pengertian media sosial menurut M.L. Kent adalah segala bentuk media komunikasi interaktif yang memungkinkan terjadinya interaksi dua arah dan umpan balik.
- b. Dave Kerpen, pengertian media sosial menurut Dave Kerpen adalah teks, gambar, video, dan kaitan secara daring yang dibagikan diantar orang-orang dan organisasi.
- c. Lon Safko, pengertian media sosial menurut Lon Safko adalah media yang kita gunakan untuk menjadi sosial.
- d. Joyce Kasman Valenza, pengertian media sosial menurut Joyce Kasman Valenza adalah platform internet yang memungkinkan bagi individu untuk berbagi secara segera dan berkomunikasi secara terus menerus dengan komunitasnya.
- e. M.Terry, pengertian media sosial menurut M. Terry adalah sebagai pengguna isi bersama yang menggunakan teknologi penyiaran berbasis internet berbeda dari media cetak dan media siaran tradisional.

## 2. Fungsi Sosial Media

Pada perannya saat ini, media sosial telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini yang membuat fungsi media sosial sangatlah besar. Adapaun beberapa fungsi media sosial secara umum :

- a. Memperluas interaksi sosial manusia dengan menggunakan teknologi internet serta web.
- b. Menghasilkan komunikasi dialogis antara banyak *audiens* (*many to many*).
- c. Melaksanakan transformasi manusia yang tadinya pemakai isi pesan berganti jadi pesan itu sendiri.

---

<sup>18</sup> Ruli Nasrullah, “*Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*”, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2017) Hal 11

- d. Membangun personal branding untuk para pengusaha maupun tokoh masyarakat.
- e. Sebagai media komunikasi antara pengusaha maupun tokoh masyarakat dengan para pengguna media sosial yang lain.<sup>19</sup>

Dari Penjelasan tentang media sosial diatas maka penulis menyimpulkan bahwa media sosial sangat berdampak besar bagi masyarakat dari sebagai saran berinteraksi sampai sarana mencari ilmu namun akan sangat berbahaya jika terjadinya kejahatan di sosial media dilihat dari fungsi media sosial yang sangat besar dalam kehidupan di masyarakat.

## **F. Tinjauan Umum Tentang *Cyber Crime***

### **1. Pengertian *Cyber Crime***

Dalam beberapa kepustakaan, *cyber crime* sering diindentikan sebagai *computer crime*. Menurut *the U.S. Department of Justice*, *cyber crime* adalah: “Any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution.” Yang bisa di artikan *cyber crime* sebagai “Segala tindakan ilegal yang membutuhkan pengetahuan tentang teknologi Komputer untuk tindakan, penyelidikan, atau penuntutannya.” Pendapat lain dikemukakan oleh *Organization for Economic Cooperation Development (OECD)* yang menggunakan istilah *cyber crime* sebagai *computer related crime* yang berarti: “Any illegal, unethical or unauthorized behavior relating to the automatic processing and/or the transmission of data.” Yang bisa di artikan: “Segala perilaku ilegal, tidak etis, atau tidak sah yang berkaitan dengan pemrosesan otomatis dan/atau transmisi data”.<sup>20</sup>

*Cyber crime* di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi computer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi didalam pengoperasiannya. Bisa dilihat dari pendapat lain menurut Indra Safitri yang penulis ambil dari buku Maskun yang berjudul “Kehajatan siber *Cyber Crime*”, Indra Safitri mengemukakan bahwa kejahatan dunia maya adalah jenis kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan kepada

---

<sup>19</sup> Vita Anggraini, “Media Sosial : Pengertian, Jenis, Fungsi, dan Tujuan”, diakses dari <https://dosenpintar.com/pengertian-media-sosial/> pada tanggal 23 juli 2020 pukul 15.30

<sup>20</sup> Maskun., “Kejahatan Siber *Cyber Crime*”, (Jakarta: Kencana 2013) Hlm 47

tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pelamggam interntnet.<sup>21</sup>

Dari pendapat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa *cyber crime* merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai kecanggihan teknologi komputer maupun kecanggihan telekomunikasi sebagai sarana/alat.

## 2. Bentuk *Cyber Crime*

- a. *Unauthorized acces to computer system and sevice*, yaitu kejahatan yang dilakukan ke dalam suatu system jaringan computer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik system jaringan computer yang dimasukinya.
- b. *Illehal contents*, yaiut kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiba umum. Contoh menyebarkan berita bohong, permuatan yang berhubungan dengan pornografi dan lain-lain.
- c. *Data Forgery*, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.
- d. *Cyber espionage*, yaitu kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki system jaringan computer pihak sasaran.
- e. *Cyber sabotage extortion*, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap data, program computer atau system jaringan computer yang tersambung dengan internet.
- f. *Offence against inteelectual property*, yaitu kekayaan yang ditunjukan terhadap hak kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang di internet.
- g. *Infringements of privacy*, yaitu kejahatan yang ditunjukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat oeribadi dan rahasia.

---

<sup>21</sup> Ibid., Hlm 48